

**IDENTIFIKASI POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU**

***IDENTIFICATION OF POTENTIAL AND SOCIAL WELFARE RESOURCES OF
COASTAL COMMUNITIES IN THE REGENCY OF MERANTI ISLANDS, RIAU
PROVINCE***

Dian Venita Sary

Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau,
Jl. Kaharuddin Nst No.113, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia, 28753
Email: dianvntsry@student.uir.ac.id

Khairul Rahman

Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau,
Jl. Kaharuddin Nst No.113, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia, 28753
Email: khairul.ip@soc.uir.ac.id

Rendi Prayuda

Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau,
Jl. Kaharuddin Nst No.113, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia, 28753
Email: rendiprayuda@soc.uir.ac.id

Rio Sundari

Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau,
Jl. Kaharuddin Nst No.113, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia, 28753
Email: riosundari@soc.uir.ac.id

Abstrak

Luasnya potensi perairan di Indonesia tidak menjamin kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasar pada kajian literatur, karakteristik masyarakat pesisir masih termarginalisasi akibat aksesibilitas terhadap layanan dasar dan tingkat ekonomi yang rendah. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, dan solusi meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui pendekatan pemberdayaan. Metode kualitatif digunakan dalam kajian ini dengan menganalisa berbagai sumber rujukan seperti jurnal, buku, research desktop dengan kajian terkait. Data sekunder dianalisis secara systematic review dan diidentifikasi secara deskriptif berdasarkan hasil analisis SWOT. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki indikator kesejahteraan yang relatif rendah akibat ketertinggalan secara ekonomi, padahal memiliki potensi sumber daya alam laut serta berdekatan dengan jalur laut internasional. Namun, terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan, yakni secara internal, rendahnya kemampuan masyarakat pesisir dalam memahami dan memanfaatkan teknologi serta mengelola sumber daya secara tepat, dan kecenderungan masyarakat yang terus menerima bantuan pemerintah dan tidak berusaha berkembang secara mandiri. Faktor eksternal antara lain: minimnya sarana/prasarana fasilitas layanan dasar seperti, layanan pendidikan, kesehatan, bank dan koperasi desa, serta akses modal dan pasar, selain ketergantungan terhadap cuaca bagi masyarakat dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Program pemberdayaan yang sesuai bagi masyarakat pesisir ialah program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat

melalui, (1) funding access, (2) akses teknologi, (3) market access, (4) pengembangan alternatif mata pencaharian, dan (5) collective action.

Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial, Potensi, Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir, Kepulauan Meranti.

Abstract

The vast potential of waters in Indonesia does not guarantee the welfare of the people living in coastal areas, especially in the regency of Meranti Islands. Based on the literature review, the characteristics of coastal communities are still marginalized due to the limited accessibility to basic services and the low level of economy. This study aims to identify the potential and sources of social welfare of coastal communities in the Regency Meranti Islands and solutions to improve welfare both socially and economically through an empowerment approach. Qualitative methods are used in this study by analyzing various reference sources, such as: journals, books, desktop research with related studies. Secondary data were analyzed by systematic review and identified descriptively based on the results of the SWOT analysis. The results of the study show that the coastal communities of the Regency of Meranti Islands have relatively low welfare indicators due to being economically backward, even though they have natural marine resources and they are close to international sea routes. However, there are internal and external factors that impede their development, namely internally, the low ability of coastal communities to understand as well as to utilize technology and appropriate resource management, and their tendency to continue receiving government assistance and not thriving independently. External factors include the lack of basic service facilities/infrastructure, such as: education, health, bank and village cooperatives, as well as access to funding and markets, aside from the dependency on the weather for those who work as fishermen. The appropriate empowerment program for coastal communities is the socio-economic empowerment program of the community through, (1) funding access, (2) access to technology, (3) market access, (4) development of alternative livelihoods, and (5) collective action.

Keywords: sosial welfare, potention, empowerment, coastal community, the regency of meranti islands.

PENDAHULUAN

Masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur merupakan tujuan dari pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki hubungan dengan kestabilan suatu negara dan menunjang pembangunan.

Indonesia merupakan *Archipelago State* yang memiliki kisaran 70 persen wilayah laut. Wilayah laut ini memiliki potensi yang tinggi dalam segi ekonomi kelautan dan keragaman sumber daya perikanan. Potensi keragaman ini

bernilai ekonomis untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah perairan atau yang biasa disebut sebagai wilayah pesisir. Namun, dari potensi yang beragam tersebut justru tingkat kesejahteraan di wilayah pesisir masih minim akibat kemiskinan. Sebagaimana penelitian Indarti (2015) umumnya masyarakat pesisir tidak hanya termarginalisasi dalam hal geografis, melainkan juga dalam aspek internal masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, menghadapi berbagai fenomena sosial, terutama kesejahteraan dan kemiskinan, diperlukan pembangunan dan pemberdayaan di wilayah tersebut.

Pembangunan sektor kelautan dalam pembangunan ekonomi nasional selalu berada dalam posisi yang dipinggirkan (*peripheral sector*). Hal ini berarti bahwa sektor kelautan

yang juga dapat menjadi industri maritim, pariwisata bahari, jasa ekspor sumber daya laut, bukan menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi nasional. Padahal luas perairan Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta km². Kondisi tersebut menjadi ironis jika dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan pada wilayah tersebut yang masih termarginalisasi (Wahdaniyah et al., 2018).

Taraf kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat dari pembangunan nasional yang mencerminkan kualitas hidup individu atau kelompok. Sebagaimana penelitian oleh Fadli dan Nurlukman (2018), upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak hanya mencakup pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fish management*) saja, melainkan juga menyangkut persoalan bagaimana jaminan pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan taraf hidup yang layak dan mengatasi kemiskinan. Safitri et al. (2017) mengungkapkan perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat akan pentingnya memajukan ekonomi dan menanamkan pola pikir modern untuk dapat menerima perubahan ke arah yang lebih maju. Sosialisasi dan pengabdian dapat menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir yang harus dilakukan secara menyeluruh, beserta intervensi teknologi *socio industry* sesuai perkembangan zaman.

Kehidupan masyarakat yang menetap di wilayah pesisir pada esensinya masih menggantungkan nasibnya pada hasil laut. Dijelaskan juga kegiatan penangkapan ikan merupakan prioritas utama masyarakat pesisir yang harus menjadi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Terdapat beberapa teknis yang menghambat kesejahteraan yakni sebagian besar masyarakat pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan yang karakteristik penangkapannya tradisional

dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang minim (Syatori, 2014).

Hal lainnya, permasalahan yang tidak terduga seperti musim yang tidak dapat diprediksi, sumber daya manusia yang rendah, dan peralatan yang digunakan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Hasil tangkapan masyarakat pesisir cenderung masih bernilai ekonomis rendah. Dipandang perlu untuk meminimalisir masyarakat yang cenderung menangkap hasil laut secara eksploitatif tanpa mengetahui nilai ekonomis dari hasil tangkapannya, sehingga menyebabkan usaha yang dilakukan tidak dapat mengimbangi efisiensi ekonomi. Maka dari itu, pemberdayaan masyarakat pesisir harus dilakukan agar harga pasar sama dengan biaya penangkapan ataupun, pendapatan setara dengan rata-rata biaya penangkapan (Isna, 2013).

Menurut Mubyarto (dalam Sabarisman, 2017), apabila dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain pada sektor pertanian, nelayan (terutama buruh nelayan) digolongkan sebagai strata sosial paling rendah meski tidak semua dapat dikatakan demikian. Begitu juga menurut Indarti (2015) yang membuktikan bahwa hal tersebut dikarenakan sebagian besar anggota keluarga yang menetap di wilayah pesisir tidak produktif dalam segi ekonomi. Di lain sisi, sumber utama dari hasil perikanan tidak dijual kepada konsumen secara langsung melainkan kepada tengkulak atau "*Toke*" yang memiliki kondisi ekonomi yang baik.

Selain itu, ketertinggalan masyarakat pesisir dapat pula dilihat dari terbatasnya akses sumber modal dan infrastruktur kelembagaan sosial ekonomi yang minim di tingkat desa. Demikian pula kultur akses pasar dan kewirausahaan yang masih berfokus pada manajemen rumah tangga dengan orientasi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data Bappenas (2010), Kabupaten Kepulauan Meranti yang berada di Provinsi Riau termasuk satu dari lima kawasan prioritas perbatasan antara laut Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam, selain Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir dan Rokan Hulu. Ditinjau dari sudut pandang geografis, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan satu-satunya kepulauan di Provinsi Riau yang letaknya juga strategis, karena berdekatan dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional Selat Malaka, Singapura, dan Malaysia yang sejatinya memberikan peluang dan ancaman tersendiri dalam pengembangan daerah (Anggrahita et al., 2018).

Tabel 1. Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Indikator	Satuan	2019
Luas Wilayah	Km ²	3707,84
Ketinggian	Mdpl	6
Curah Hujan	Mm/bulan	24,23
Hari Hujan	Hari/bulan	7,33

Sumber: BPS Kepulauan Meranti, 2019

Berdasarkan data BPS (2020), beberapa daerah yang termasuk kawasan pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kawasan Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti

Kecamatan	Desa/Kelurahan
Rangsang	Desa Sungai Gayung Kiri
	Tanjung Bakau
	Desa Gemala Sari
	Tanjung Medang
Rangsang Pesisir	Desa Beting
	Desa Bungur

Merbau	Desa Sendaur
	Tanjung Kedabu
Merbau	Desa Mekar Sari
	Desa Bagan Melibur
	Desa Mayang Sari
Pulau Merbau	Kuala Merbau
	Desa Padang Kamal
Tasik Putri Puyu	Desa Selat Akar
	Desa Bandul
	Desa Dedap

Sumber: BPS Kepulauan Meranti, 2020

Pemberdayaan masyarakat pesisir sangat penting karena indikator kesejahteraan menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menangani kemiskinan.

Pelaksanaan program pada dasarnya sebagaimana dirangkum oleh (Sabarisman, 2017) telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Peraturan di atas menyebutkan upaya penanganan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah di wilayah pesisir dan pulau kecil dilakukan melalui: (1) bantuan akses modal dan akses pemasaran hasil usaha; (2) penyediaan alternatif mata pencaharian di bidang sumber daya laut dan perikanan; (3) pemeliharaan potensi, daya dukung lingkungan pesisir; (4) peningkatan pengamanan sumber daya laut; dan (5) penguatan aspek kelembagaan dan organisasi masyarakat pesisir/nelayan.

Hingga saat ini, penelitian tentang fenomena pemberdayaan sosial masyarakat pesisir telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun minim tulisan yang membahas mengenai pemberdayaan ekonomi dan kemiskinan

masyarakat pesisir secara umum, terlebih belum ada kajian mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti secara khusus dan mempertimbangkan identifikasi potensi dan sumber kesejahteraan masyarakat pesisir. Kajian yang dilakukan oleh Iswari et al., (2019) di Kabupaten Jembrana menyimpulkan bahwa masyarakat pesisir masih mengalami ketertinggalan pada arahan dan pendampingan, dan penyediaan sarana transportasi dan komunikasi antara *stakeholder* sehingga menyebabkan pemberdayaan belum optimal. Selain itu, kurangnya program pemberdayaan dan pembinaan pemerintah menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sementara itu, kajian yang dilakukan Qodriyatun (2013) di Kota Batam menyimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat pesisir jangan hanya dengan memberikan modal usaha namun harus juga sejalan dengan perlindungan terhadap sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Penelitian Sara et al. (2011) menyimpulkan bahwa permasalahan rendahnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, dapat ditingkatkan yakni dengan pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu melalui pendekatan *bottom up* agar masyarakat mudah mengakses program pemberdayaan pemerintah maupun dunia usaha. Selain itu, perlu ada pelibatan *stakeholder* pada lingkungan masyarakat pesisir pada proses pemberdayaan. Keseluruhan usaha pemberdayaan masyarakat pesisir ini bermuara untuk mengurangi degradasi sumber daya pesisir dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data serta informasi melalui jurnal, buku dengan kajian terkait, laman pencarian data seperti *Google Search*, *Google*

Scholar, dan *Scimago* serta beberapa artikel yang berasal dari *research desktop* lainnya. Kemudian data dan informasi dianalisis secara *systematic review*. Proses identifikasi dilakukan dengan cara menganalisis SWOT secara deskriptif. Penjelasan metodologis dari deskriptif adalah upaya untuk menjawab pertanyaan “apa dan bagaimana” sehingga dalam artikel ini penulis berupaya menjelaskan: 1) Apa hambatan dan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti? 2) Bagaimana strategi dan pendekatan yang diperlukan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti?

Tujuan kajian ini untuk mengidentifikasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, dan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara sosial dan ekonomi melalui pendekatan pemberdayaan.

PEMBAHASAN

Karakteristik Masyarakat Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti

Sebagaimana dikutip dari Safrizal (2014) pada laman GoRiau.com Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam yang beragam. Selain terdapat potensi pertambangan minyak, terdapat pula peternakan burung walet dan lahan pertanian. Ditambahkan oleh Hidayat dan Darwin (dalam Anggrahita et al., 2018), perairan dan perikanan juga menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat terutama di daerah pesisir.

Kristiyanti (2016) dalam analisisnya menjelaskan hampir sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut, pantai, dan pesisir sehingga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber kelautan. Hal tersebut memberikan identitas dengan karakteristik tersendiri sebagai masyarakat pesisir.

Karakteristik masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Menurut Lewaherilla (dalam Sabarisman, 2017) kesehariannya menetap di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir sendiri merupakan masyarakat yang menetap di suatu wilayah pesisir dan melakukan kegiatan sosial-ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya pesisir. Rata-rata masyarakat pesisir memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pembudidaya ikan, penambang pasir, dan transportasi laut (Fatmasari, 2016).

Sedangkan menurut Febianto, (2011) wilayah pesisir adalah titik temu darat dan laut. Pembagian antara bagian darat dan laut tersebut didasarkan pada letak dan pengaruhnya. Terdapat dua permukaan bagian darat baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh air pasang-surut, air asin, dan angin laut. Sedangkan daerah laut meliputi bagian yang masih dipengaruhi proses alami sedimentasi dan aliran air tawar maupun aktivitas manusia di darat seperti eksploitasi dan pencemaran sumber daya laut. Di daerah inilah masyarakat pesisir pada umumnya tinggal dan menetap. Berikut merupakan data kondisi demografi wilayah Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti (Tabel 3).

Tabel 3. Data Demografi Wilayah Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti

Kec.	Desa/Kel.	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Pekerjaan
	Sungai Gayung Kiri	80,62 Km ²	1.353 Jiwa	Rata-rata Masyarakat
Rangsa ng	Tj. Bakau	24,50 Km ²	1.674 Jiwa	memiliki mata
	Desa Gemala Sari	43,50 Km ²	1.119 Jiwa	pencaharian Melaut

	Tj. Medang	34 Km ²	1.173 Jiwa	dan Nelayan
	Desa Beting	24 Km ²	985 Jiwa	
Rangsa ng Pesisir	Desa Bungur	55,39 Km ²	2.337 Jiwa	
	Desa Sendauro	13,70 Km ²	918 Jiwa	
	Tj. Kedabu	88,86 Km ²	2.218 Jiwa	
	Desa Mekar Sari	29 Km ²	1.329 Jiwa	
Merbau	Desa Bagan Melibur	41,9 Km ²	1.923 Jiwa	
	Desa Mayang Sari	42,5 Km ²	810 Jiwa	
Pulau Merbau	Kuala Merbau	62 Km ²	2.416 Jiwa	
	Padang Kamal	28,4 Km ²	804 Jiwa	
	Selat Akar	50 Km ²	2.063 Jiwa	
Tasik Putri Puyu	Bandul	24 Km ²	3.024 Jiwa	
	Dedap	78 Km ²	2.063 Jiwa	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Sementara itu Sjafari et al. (2018) menjelaskan bahwa masyarakat pesisir sendiri memiliki karakteristik mata pencaharian sebagai nelayan yang terdiri dari beberapa kelompok kelas nelayan, sama halnya dengan masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Jenis Masyarakat Nelayan di wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti

Nelayan Petambak	Terdapat dua tipe: 1. Petambak tanah pribadi 2. Perambak penyewa yang dimana biaya operasionalnya lebih besar dari hasil tangkapan, ditambah harus membayar sewa tanah
Nelayan Tangkap	Jenis kelompok dengan mata pencaharian utama menangkap ikan di muara, sungai dan laut
Nelayan Buruh	Kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti

Sumber: dikelola penulis, 2021

Di samping pengelompokan masyarakat nelayan tersebut, Widodo dan Suadi (dalam Khatami et al., 2017) mengatakan bahwa terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan dalam penggambaran strata/kelas nelayan, seperti nelayan penuh (*strategy on farm*) yakni bagi mereka yang menggantungkan kehidupannya sebagai nelayan tangkap dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian, nelayan sambilan (*strategy off farm*) bagi mereka yang sebagian hidupnya tergantung dari hasil tangkapan, sedangkan sebagian lain dari hasil bekerja sebagai ABK (anak buah kapal). Selanjutnya, kelompok masyarakat juragan atau bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti menyebutnya “*Toke*” merupakan panggilan bagi mereka yang memiliki modal besar sebagai pinjaman atau usaha perikanan, kapal, dan alat tangkap.

Pada dasarnya dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat setiap kelompok masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti ini memiliki sarana/prasarana yang berbeda. Pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap misalnya, membutuhkan sarana dan alat penangkapan, sementara nelayan tambak

membutuhkan modal kerja dan investasi, begitu pula nelayan buruh. Menurut Qodriyatun, (2013), mereka yang bekerja sebagai nelayan memiliki sekitar delapan bulan dalam setahun dengan waktu produktif rata-rata melaut sekitar 20 hari per bulan. Hal ini tentu memperkecil pendapatan yang diperoleh dan seringkali pendapatan pada musim ikan hanya mampu mencukupi kebutuhan konsumsi saat musim paceklik tiba.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konstruksi antara pihak sektoral kepada masyarakat dalam hal pelatihan, pembangunan, pemberdayaan, peningkatan kelembagaan daerah, dan penumbuhan partisipasi masyarakat pada lingkup sosial ekonomi (Noor, 2018)

Chamber (1995) (dalam Noor, 2018) memberikan sebuah konsep pemberdayaan sosial yang menganut paradigma baru pembangunan, yaitu berorientasi pada “*people-centered, empowering, participaty, and sustainable.*” Dari visi tersebut, tentu masyarakat tidak dengan sendirinya berkembang dalam pemberdayaan sosial, tetapi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

Sementara itu, Lesnussa, (2019) menyebutkan bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang, khususnya pada individu/kelompok lemah dan rentan, sehingga mereka dapat diupayakan untuk memiliki kemampuan: (a) menjadi sumber daya produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan taraf kesejahteraan dan mendapatkan barang/jasa yang diperlukan, (b) memenuhi kebutuhan pokok sehingga mereka terbebas bukan hanya dalam penyampaian pendapat melainkan kelaparan dan kemiskinan, serta (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan yang

berkelanjutan dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memberdayakan kelompok rentan dalam masyarakat termasuk mereka yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah (kemiskinan). Sebagai tujuan, maka pemberdayaan dapat dikatakan suatu misi yang ingin dicapai dalam perubahan sosial berupa masyarakat yang produktif dan berdaya saing, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, sosial dan ekonomi, memiliki mata pencaharian, turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta mandiri, berintegritas dan percaya diri dalam menyampaikan aspirasi. (Rosalinawati, 2013).

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi alternatif pembangunan dengan tujuan memfasilitasi masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya dan memiliki kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat harus menyentuh kelompok masyarakat sasaran yang juga merupakan subjek dalam konsep pembangunan sosial ekonomi (Noor, 2018).

Menurut Rahim (dalam Siti et al., 2020), program pemberdayaan sosial masyarakat pesisir dinilai masih melihat persoalan kemiskinan pada fenomena yang tampak seperti aspek ekonomi semata. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan berupa *charity* dan tidak menyentuh akar kemiskinan masyarakat itu sendiri. Sementara program yang berlaku tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat dan mencapai aspek *sustainable development* terutama di wilayah pesisir. Untuk itu, perlu diperhatikan bagaimana supaya bantuan sosial tersebut lebih tepat sasaran. Harus adanya program yang berkaitan dengan pengenalan sasaran dengan pengembangan *test* kebutuhan

sebagai salah satu alternatif instrumen penyaluran dana bantuan yang diberikan menyeluruh secara masif dan tepat sebagai faktor pendorong.

Kegagalan pencapaian hasil dalam pemberdayaan masyarakat menurut Alim, (2019) dapat dipengaruhi oleh dinamika permasalahan yang meliputi: adanya perbedaan pemahaman karakter dan pola pikir aktor pelaksana dan masyarakat; kurangnya kemauan moral dan partisipasi politik untuk membangun kesadaran dalam memperkuat moral sosial; adanya budaya politik/kebiasaan masyarakat untuk bergantung pada bantuan pemerintah dan menerima bantuan berupa uang dan/atau barang. Selain itu, kewenangan dalam pengambilan keputusan dan alokasi anggaran yang terlalu berjenjang sehingga menghambat proses pelaksanaan pemberdayaan.

Sebagaimana dikatakan Makagingge et al. (2017) untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan di wilayah pesisir perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang bersifat partisipatif. Dalam tatanan pemerintah, diperlukan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan. Sedangkan, pada tatanan masyarakat, harus turut serta dalam pengambilan keputusan karena pemberdayaan masyarakat pesisir bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri dengan cara memberikan pembekalan, pengabdian, dan pengetahuan agar dapat mengenali potensi sumber daya alam yang tersedia dengan menerapkan sarana/prasarana tepat guna. Selain itu, upaya ini akan menekankan pada peningkatan partisipatif masyarakat untuk mengkaji potensi lingkungan di sekitarnya dalam melakukan perencanaan program, implementasi, monitoring dan evaluasi. Sehingga upaya ini juga diharapkan cepat diterima dan direalisasikan oleh masyarakat, disamping menjadi pembelajaran bagi masyarakat pesisir itu sendiri. Oleh sebab

itu, kunci program pemberdayaan masyarakat pesisir adalah dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai mitra dalam program pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan motivasi dan mempercepat pengimplementasian tujuan dari program pemberdayaan tersebut.

Pada dasarnya, realisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan wujud untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas masyarakat. Margayaningsih (2018) menjelaskan bahwa program pemberdayaan harus melibatkan pemerintah sepenuhnya dalam membangun relasi kerjasama dengan masyarakat melalui swadaya pesisir. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di wilayah pesisir itu sendiri. Peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir pada esensinya telah dilaksanakan melalui beberapa program peningkatan kesejahteraan, yaitu berupa sosialisasi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten yang diprakarsai oleh pemerintah daerah. Akan tetapi dalam proses implementasi dan penyelenggaraannya belum mencakup keseluruhan masyarakat, sehingga masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Atas dasar uraian di atas, pemberdayaan masyarakat pesisir sangat diperlukan sebagai suatu pendekatan. Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan usaha yang secara sistematis, berkesinambungan, dan terencana dalam membangun kemandirian ekonomi, sosial dan politik dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Sebagaimana dijelaskan oleh Satria (2001) (dalam Abidin, 2017) kemandirian masyarakat diperlukan untuk meningkatkan *bargaining position* (posisi tawar) dalam pembangunan kawasan pesisir dan pemanfaatan potensi sumber daya alam. Kemandirian masyarakat pesisir adalah suatu tahapan yang

menentukan keberhasilan pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Unsur kemandirian masyarakat ditentukan oleh kapasitas diri, kemampuan ekonomi dan politik, dan pemahaman terhadap prinsip partisipasi pembangunan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat pesisir akan menjadi subyek pembangunan dan kedinamisan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga, Kusnadi (dalam Abidin, 2017) turut menambahkan bahwa program pemberdayaan harus mampu mendorong terealisasinya mobilitas vertikal masyarakat pesisir.

Konsep pendekatan pemberdayaan masyarakat menurut Hikmat (2006) (dalam Goenadhi, 2016) pada dasarnya selalu dihubungkan dengan kemandirian, jaringan kerja, partisipasi, dan kesejahteraan yang diletakkan pada tingkat individu maupun sosial. Melalui pendekatan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada masyarakat pesisir untuk memanfaatkan dan mengola sumber daya pesisir secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga dengan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai pendekatan, masyarakat mampu mandiri dan berintegrasi untuk mengoptimalkan sumber daya di luar dari tantangan dan kelemahan yang ada.

Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, sebagaimana disampaikan Arief & Pradini (2019) bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di wilayah pesisir terbilang relatif rendah. Hal ini dikarenakan masih tingginya persentase rumah tangga miskin. Kondisi tersebut diperparah dengan tingkat pendidikan dan pengelolaan sumber daya yang hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, padahal sektor tersebut dapat dikembangkan menjadi komoditi

potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir.

Mendukung penjelasan di atas, daerah yang berada di wilayah pesisir/pantai umumnya memiliki unit sarana dan prasarana paling minim, terutama infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan air bersih (Gevisioner et al., 2014). Tidak hanya itu, peralatan mata pencaharian yang digunakan untuk menangkap

ikan masih tradisional, biasanya masyarakat pesisir menggunakan sampan dayung dengan alat tangkap seperti jaring dan pancing. Ketertinggalan secara ekonomi juga dirasakan masyarakat pesisir lantaran minimnya aksesibilitas infrastruktur, seperti buruknya kondisi jalan, terbatasnya fasilitas kesehatan, pendidikan, koperasi dan angkutan perhubungan baik laut maupun darat.

Tabel 5. Fasilitas Layanan Dasar dan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Pendidikan				Kesehatan			Bank	Koperasi
		TK	SD	SMP	SMA	Puskesmas	Pustu	Poskesdes		
Rangsang	Sei. Gayung Kiri	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	Tj. Bakau	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Desa Gemala Sari	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Tj. Medang	1	2	1	-	-	1	-	-	-
Rangsang Pesisir	Desa Beting	-	1	-	-	-	-	1	-	1
	Desa Bungur	1	1	-	1	-	1	-	-	-
	Desa Sendaur	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	Tj. Kedabu	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Merbau	Desa Mekar Sari	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Desa Bagan Melibur	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mayang Sari	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Pulau Merbau	Kuala Merbau	1	4	1	1	-	-	-	-	-
	Padang Kamal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasik Putri Puyu	Selat Akar	1	2	1	-	-	-	-	-	1
	Bandul	1	3	1	1	-	-	-	-	1
	Dedap	2	2	1	-	-	-	-	-	1

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, 202

Selain itu, Gevisioner et al. (2014) mengungkapkan hubungan antara sebagian besar desa wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti baru dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dengan kondisi sebagian

jalan rusak atau belum diaspal. Kondisi ini menyebabkan perkembangan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir terhambat sebab untuk memasarkan hasil perikanan wilayah tersebut, masyarakat hanya bisa menggunakan kendaraan roda dua sampai ke pelabuhan

menggunakan kumpang (kapal kecil yang dapat mengangkut motor dan pasokan hasil ikan) menuju Kota Selat Panjang tempat para *Toke*. Setelah dari para *Toke*, hasil perikanan diproses dan diekspor keluar.

Sejalan dengan penelitian Romawati et al. (2017) yang mengatakan adanya polarisasi dan marginalisasi antara masyarakat pesisir yang bermata pencaharian nelayan dengan para penadah perikanan/*Toke*. Alasan tersebut diperkuat dengan kondisi masyarakat pesisir yang umumnya menjadi nelayan tidak memiliki cukup modal dalam mengakses pasar, dan minimnya pengetahuan dalam menggunakan

teknologi. Sedangkan para *Toke* perikanan yang memiliki modal yang cukup akhirnya memberikan jebakan hutang (*debt trap*) dan merugikan komunitas masyarakat pesisir.

Selain itu, masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan kajian oleh Andreas & Savitri (2016), mengalami beberapa tantangan, seperti kurangnya pemberdayaan sosial kepada masyarakat secara kultural sehingga mempengaruhi tingkat pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi, dan tingginya tingkat kemiskinan. Hal tersebut, menjadi pangkal rendahnya produktivitas masyarakat dan meningkatnya kemiskinan.

Tabel 6. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	P0	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Kabupaten Kepulauan Meranti	2020	47,10	25,28 %	4,32	1,11	520 955, 00
	2019	49,89	26,93 %	5,97	1,93	483 377, 00
	2018	51,17	27,79 %	5,22	1,37	462 535, 00

Sumber: BPS Kepulauan Meranti, 2020

Keterangan:

P0 (Presentase Penduduk dibawah garis Kemiskinan)

P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan)

P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan)

Data Tabel 6. menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, walaupun pesentasenya masih relatif tinggi, yakni sekitar 25,28 persen dengan indeks 4,32 dibandingkan dengan daerah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau, yaitu sekitar 6,90 persen hingga 10,31 persen dengan rata-rata indeks 4,04. Hal ini membuktikan masih banyak masyarakat di Kabupaten

Kepulauan Meranti yang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar sehari-hari.

Rozikin et al., (dalam Arrozaaq, 2016) menyebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat pesisir dihadapkan dengan isu serius, dimulai dari pemberdayaan yang masih belum terkonsentrasi pada daerah yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung keberlanjutan, ditambah adanya perbedaan yang mencolok antara desa-desa wilayah daratan dengan daerah pesisir di Kabupaten Kepulauan

Meranti. Sebagaimana yang disampaikan Arief & Pradini (2019) bahwasanya kegiatan yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti hanya fokus pada peningkatan hasil keuntungan atau omzet produksi, sehingga terjadi berbagai persoalan seperti: pengurasan sumber daya laut yang menyebabkan *over exploited*.

Persoalan tersebut menurut Kusnadi (dalam Sudarso, 2011) menyebabkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti masih dikategorikan sebagai masyarakat miskin dan terbelakang. Berpangkal pada rendahnya produktivitas masyarakat yang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal, berupa minimnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan alat penangkapan modern dan meningkatkan pengelolaan sumber daya. Pada faktor eksternal, berupa minimnya akses teknologi, akses pasar, dan pengembangan alternatif mata pencaharian.

Witarsa (2015) menyatakan bahwa penyebab masyarakat pesisir menjadi masyarakat termarginalisasi dan membutuhkan pemberdayaan adalah dikarenakan rendahnya pemahaman teknologi dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Berbeda dengan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya mencari ikan di laut dan memiliki usaha pengelolaan tangkapan ikan, masyarakat pesisir yang hanya bergelut sebagai nelayan harus bergantung pada cuaca. Selain itu pula, alat tangkap dan sarana menangkap ikan serta pengawet yang dibutuhkan tidak dimiliki oleh masyarakat di sana. Disebutkan oleh Hurmain & Puriana (2013), sebagian besar masyarakat masih menggunakan metode penangkapan tradisional, yakni seperti sampan dayung dengan teknologi penangkapan sederhana menggunakan alat jaring, pancing, pukot bilis, dan jaring ketam. Sementara, alat pengawet berupa *styrofoam box* dengan es batu di dalamnya. Kemudian, tidak semua masyarakat pesisir Kabupaten

Kepulauan Meranti memiliki alat tangkap sendiri, sehingga tidak ada alternatif lain selain harus bekerja pada orang lain dan menjadi buruh nelayan. Kondisi ini menjadi lebih buruk ketika sistem bagi hasil tidak menguntungkan. Umumnya masyarakat pesisir hampir sebagian bekerja dengan juragan nelayan atau *Toke*. Para *Toke* ini yang memberi modal melaut bagi masyarakat pesisir yang ingin menangkap ikan, contohnya seperti modal bahan bakar dan rokok. Kemudian hasil tangkapan didaratkan kepada *Toke* dengan potongan modal yang telah diberikan sebelumnya.

Selanjutnya Hurmain & Puriana (2013) menambahkan bahwa para *Toke* penadah hasil tangkapan masyarakat kebanyakan merupakan orang kaya yang berasal dari luar daerah, mereka memberi kemudahan dalam peminjaman kebutuhan primer dan sekunder. Kehadiran *Toke* di kalangan masyarakat pesisir tidak menutup kemungkinan membantu, tetapi ketika pinjaman melewati batas waktu pembayaran, terdapat bunga yang harus dibayar oleh masyarakat. Masyarakat pesisir dan juragan nelayan/*Toke* dapat dikatakan merupakan bentuk polarisasi taraf hidup di wilayah pesisir.

Lebih spesifik, Romawati et al. (2017) menambahkan bahwa masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti tidak dapat terlepas dari relasinya dengan penadah hasil perikanan yang disebut *Toke*. Para *Toke* tersebut cukup dominan kegiatannya dalam hal jual-beli hasil perikanan. Seakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat selepas menangkap ikan akan langsung dijual kepada *Toke*, karena selain pada *Toke*, hasil perikanan tersebut akan sulit laku. Kebanyakan *Toke* adalah orang-orang kaya yang memberikan kemudahan dalam modal dan pinjaman. Cicilan pinjaman dapat dilakukan melalui potongan hasil tangkapan sehingga terkadang masyarakat saat pulang ke

rumah tidak membawa hasil apapun karena habis untuk membayar hutang.

Kemudian Hurmain & Puriana (2013) juga menyatakan bahwa terdapat beberapa cara penjualan hasil tangkapan ikan yang cukup unik dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penjualan dapat dilakukan dengan: *pertama*, masyarakat dapat menjual hasil perikanan dengan cara *ship to ship*, di mana para nelayan dan *Toke* sama-sama berada di atas perahu dan melakukan transaksi. *Kedua*, masyarakat dapat mendaratkan hasil perikanan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) milik para juragan nelayan/*Toke* untuk dijual. *Ketiga*, masyarakat yang ingin memasarkan hasil perikanan keluar dari daerahnya harus menggunakan kendaraan roda dua melalui jalan yang sebagian masih rusak atau belum di aspal, kemudian menuju pelabuhan perbatasan daerah menggunakan *kempang* (kapal yang dapat membawa kendaraan dan hasil perikanan) menuju pasar di Kota Selat Panjang.

SWOT Analysis Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti

Kusnadi (dalam Rosni, 2017) menyatakan terdapat dua faktor internal dan eksternal yang

berpengaruh pada sulitnya meningkatkan kesejahteraan. Faktor internal, yaitu: (1) kualitas sumber daya manusia yang rendah, (2) keterbatasan kemampuan modal, pasar, dan teknologi, (3) relasi antara berbagai pihak seringkali tidak menguntungkan masyarakat (termasuk buruh nelayan), dan (4) ketergantungan terhadap mata pencaharian melaut. Sedangkan, faktor eksternal yaitu: (1) sistem bagi hasil lebih menguntungkan penadah perikanan, (2) kerusakan dan eksploitasi ekosistem, dan (3) kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada produktivitas yang menunjang ekonomi parsial pada skala nasional.

Tampubolon (2013) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa sejatinya, model dari konsep pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir akan dipengaruhi atas dua kondisi, yakni lingkungan internal dan eksternal. Pengaruh tersebut nantinya akan menentukan tingkat kesuksesan program kesejahteraan masyarakat. Secara sinergis, lingkungan internal akan menentukan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), kemudian lingkungan eksternal secara sinergis pula akan menentukan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang akan dihadapi oleh masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 7. Matriks Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal Pendorong Pemberdayaan di Kabupaten Kepulauan Meranti

	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
Internal	✓ Potensi Sumber Daya khususnya perikanan yang besar	✗ Pemberdayaan sosial yang minim didukung dengan keterampilan dan penggunaan teknologi masih kurang
	✓ Besarnya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan	✗ Presentase tingkat kemiskinan yang tinggi
	✓ Semangat kerja masyarakat yang tinggi	✗ Jiwa <i>entrepreneur</i> yang rendah
		✗ Hilang/memudarnya norma dan nilai adat istiadat
		✗ Posisi tawar pada hal kualitas SDM yang dianggap rendah

	<i>Opportunity</i>	<i>Threat</i>
Eksternal	✓ Permintaan hasil produksi ikan yang tinggi	✗ Kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan destruktif
	✓ Lokasi strategis letak penangkapan (<i>fishing ground</i>) yang luas	✗ Rendahnya integritas organisasi sosial di wilayah pesisir
	✓ Penumbuhan sektor wisata terpadu	✗ Harga pasar ditentukan oleh pihak toke
	✓ Kualitas perairan yang baik	✗ Harga BBM tinggi
	✓ Peningkatan komoditi usaha milik personal dengan standarisasi harga	✗ Hasil produksi berfluktuasi
	✓ Letak strategis tepat pada jalur perdagangan terpadat di dunia	✗ Minimnya sarana infrastruktur, pemukiman layak huni dan unit kesehatan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021

Selanjutnya, menurut Tampubolon (2013), faktor lingkungan strategis wilayah pesisir berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan analisa faktor lingkungan internal (*strength– weakness*) serta eksternal (*opportunity – threat*), ditemukan adanya faktor kekuatan dan kelemahan dari lingkungan masyarakat pesisir sebagaimana tertuang pada Tabel 7.

Tabel 8. Kolektif SWOT Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kabupaten Kep. Meranti

<i>SO</i>	<i>WO</i>
Pembukaan peluang pasar, UMKM dibantu dengan stakeholder terkait	Sosialisasi IPTEK sebagai peluang budidaya akua-kultur bagi masyarakat pesisir
Sosialisasi penting-nya Pemberdayaan dan pemanfaatan SDA pesisir	Pengembangan usaha bagi pengelolaan limbah ikan
	Menumbuhkan jiwa entrepreneur dengan men-ciptakan lapangan kerja
<i>ST</i>	<i>WT</i>

Menguatkan integritas pengamanan laut yang dalam hal ini oleh komunitas

Subsidi harga BBM bagi masyarakat Pesisir yang akan memasarkan produk-nya ke kota

Menciptakan standarisasi harga oleh masyarakat

Optimalisasi peranan *stake-holder* dengan strategi *collaborative governance*

Melakukan sinkronisasi rencana pembangunan dan kebijakan dengan pertimbangan potensi daerah pesisir

Penyediaan Infrastruktur dan sarana oleh Pemerintah

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021

Perumusan strategi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dimulai dengan mencermati hasil kolektif SWOT, di mana terlihat kurangnya keterampilan dan penguasaan IPTEK yang menyebabkan minimnya produktivitas masyarakat dalam memanfaatkan wilayah pesisir. Selain itu, terdapat masalah terkait degradasi pesisir dan kecenderungan untuk melakukan *overfishing*. Persoalan lain yang dihadapi ialah pengelolaan

limbah yang berasal dari ikan-ikan hasil penangkapan yang seringkali tidak dikelola dengan baik dan langsung dibuang di perairan, sehingga menimbulkan bau busuk serta pencemaran di saluran tambak, sungai, bahkan laut yang menyebabkan degradasi lingkungan pesisir. Secara umum, degradasi pesisir akibat eksploitasi menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat yang akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan, kurangnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan timbulnya masalah sosial (Sutrisno, 2014).

Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Merujuk pada Tabel 8. menurut Tampubolon, (2013), dapat dirumuskan strategi yang paling relevan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu (1) peningkatan produktivitas dan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan wilayah pesisir dan IPTEK; (2) peningkatan peran lembaga (*stakeholder*); (3) konservasi sumber daya pesisir dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan (4) pengembangan potensi unggulan daerah dengan wawasan *environmental friendly*.

Demikian halnya menurut pendapat Latif (dalam Nugroho, 2015), terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir yakni:

- 1) Strategi Fasilitatif, yakni suatu strategi yang mengharapkan kelompok sasaran suatu program pemberdayaan sadar terhadap potensi dan kekuatan dari sumber daya yang dimiliki. Strategi ini dikenal pula sebagai strategi kooperatif, yaitu agen perubah atau *stakeholder* terkait bersama-sama dengan masyarakat mencari upaya penyelesaian terhadap suatu permasalahan yang ada di wilayah pesisir.
- 2) Strategi Edukatif, merupakan strategi berupa pemberian pembinaan, sosialisasi,

keahlian dan pengetahuan kepada masyarakat pesisir yang akan diberdayakan.

- 3) Strategi Persuasif, merupakan strategi yang mengupayakan perubahan melalui perilaku dan kebiasaan. Strategi ini diperlukan untuk memberdayakan masyarakat yang tidak sadar akan kebutuhan perubahan, rendahnya partisipasi dan komitmen terhadap perubahan.
- 4) Strategi Kekuasaan, merupakan strategi yang membutuhkan pihak-pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan program pemberdayaan dan sanksi terhadap oknum yang mempunyai aksi atas monopoli sumber daya.

Sejalan dengan pendapat di atas, Sabarisman (2017) menyimpulkan bahwa kurangnya keberdayaan sosial masyarakat wilayah pesisir disebabkan oleh keterbatasan dalam penguasaan teknologi, pendidikan, dan modal (usaha). Sinergi antara pemerintah dan partisipasi yang dimiliki masyarakat pesisir sama-sama penting dalam program pemberdayaan sosial masyarakat. Adapun penjabaran implementasi strategi pemberdayaan sosial bagi masyarakat pesisir sebagai berikut:

1) Akses Modal Masyarakat Pesisir

Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang dapat dilakukan adalah pengembangan akses terhadap modal. Berdasar gambaran masyarakat pesisir, akses modal biasanya berasal dari para *Toke* yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan menunjang mata pencaharian. Selanjutnya, kemampuan dan pemahaman yang rendah membuat masyarakat sulit untuk memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh perbankan. Meskipun secara nasional terdapat program pemberian kredit kepada

masyarakat pesisir dengan mata pencaharian nelayan, tetapi pada tingkat lokal belum begitu teralisasi.

Sebagaimana kajian Indarti (2015) yang menyatakan bahwa hal di atas dapat menjadi suatu program usulan yang dapat dilakukan pemerintah daerah. Program akses modal yang dapat diberikan pemerintah adalah dengan menyediakan kredit ataupun dana hibah kepada masyarakat pesisir melalui lembaga keuangan daerah maupun melalui dinas terkait, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selanjutnya untuk membantu masyarakat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap jebakan hutang para penadah/*Toke*. Merujuk penelitian oleh Arief & Pradini (2019), demikian pula pemberian investasi dan pembangunan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) bagi masyarakat pesisir juga harus dipertimbangkan, karena sebelumnya TPI hanya dimiliki oleh para *Toke*/juragan nelayan. Alasan yang menjadi pertimbangan adalah, TPI yang digunakan mengharuskan masyarakat pesisir untuk memasarkan hasil ikan kepada *Toke* dengan harga yang relatif murah ditambah potongan tarif masuk/penitipan ikan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat pesisir mengalami kesulitan karena terpaksa harus memasarkan kepada *Toke* dan terus bergantung pada *Toke*.

2) Akses Teknologi

Semakin tinggi persaingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir menuntut masyarakat meningkatkan produksinya. Persaingan tersebut menjadi salah satu faktor rendahnya kesejahteraan masyarakat. Hal lain yang menjadi alasan masyarakat pesisir hidup dalam kemiskinan disebabkan oleh sarana dan prasarana penangkapan yang masih tradisional dan terbatas. Hal tersebut dibenarkan oleh Jannah (2016) yang menjelaskan bahwa kelemahan masyarakat dalam mengoperasikan teknologi sangat

berpengaruh terhadap pendapatan yang tidak sesuai dengan pengeluaran. Oleh karena itu, usulan pendekatan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dengan melalui peningkatan pemahaman masyarakat dalam menggunakan alat penangkapan berbasis teknologi yang dapat menunjang pekerjaan.

3) Alternatif Mata Pencaharian

Arrozaaq (2016) mengatakan perspektif dan argumentasi dalam perumusan strategi tersebut mengacu pada esensi bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sumber daya pesisir dan laut dengan potensi yang cukup besar. Akan tetapi, beberapa kajian menunjukkan bahwa tidak adanya pemberdayaan menyebabkan masyarakat lebih cenderung untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan (*subsistence*), tidak ada upaya untuk mengolah hasil laut dengan tepat guna agar menambah *value added*.

Pengembangan ini dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya pesisir. Kesejahteraan masyarakat pesisir bergantung pada sumber daya, namun beberapa kajian menyimpulkan bahwa tekanan sumber daya alam yang semakin terkikis akibat eksploitasi ditambah dengan pengelolaan ikan yang tidak tepat menyebabkan penumpukan limbah. Mata pencaharian alternatif menurut Sabarisman (2017) dihitung dan dianalisis berdasarkan kesejahteraan masyarakat sebagai nelayan.

4) Akses terhadap pasar (*market access*)

Konstruksi kolaborasi antara masyarakat setempat dan swasta belum berpihak terhadap masyarakat, terlihat dari berbagai perizinan pengembangan usaha hanya menguntungkan sebelah pihak antar-pemangku kepentingan. Maka, pemberdayaan harus ditekankan pada aspek pasar melalui kelembagaan daerah dan

swasta (Goenadhi, 2016). Mengenai pengembangan pasar, masyarakat harus diikutsertakan dalam segala bentuk usaha dan pembinaan usaha komoditi pesisir (biasanya hasil perikanan). Upaya ini untuk menumbuhkan jiwa *entrepreneur* masyarakat agar mampu memberikan alternatif mata pencaharian dari nelayan menjadi wirausahawan. Selain itu, keuntungan pemberdayaan dengan pemberian akses pasar adalah masyarakat mendapat jaminan akses pasar, pembinaan masyarakat dalam produksi dan kualitas, serta harga yang bersaing dibandingkan harus menjual hasil perikanan kepada penadah/*Toke* dengan harga yang biasanya lebih murah.

5) Penguatan *Collective Action*

Dijelaskan oleh Warm (dalam Fadli & Nurlukman, 2018) aksi pemberdayaan masyarakat olah kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga merupakan elemen kunci dalam mendorong modernisasi dan kesejahteraan masyarakat pesisir untuk mengatasi masalah yang ada. Sebagaimana dirangkum oleh Anwas (dalam Nindatu, 2019), penerapan konstruksi *Collective Action* secara tidak langsung menciptakan kegiatan/program penunjang masyarakat yang menjadikan mereka tidak lagi bergantung pada bantuan sosial yang diberikan pihak berwenang sehingga mampu meningkatkan kemandirian masyarakat secara independen. Tujuan dari penguatan *Collective Action* adalah mengembangkan wilayah pesisir, merangsang pertumbuhan produksi, dan memberi peluang pergerakan pasar yang menguntungkan semua pihak. Dalam proses ini, masyarakat, pemerintah, swasta dapat bekerja secara kolektif untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk menumbuhkan

ekonomi daerah dan lapangan pekerjaan baru.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang memiliki dampak terhadap potensi dan hambatan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satu hambatan yang muncul pada faktor internal yaitu rendahnya kemampuan masyarakat pesisir dalam memahami dan memanfaatkan teknologi serta pengelolaan sumber daya yang tepat sehingga menyebabkan *over exploited*. Selain itu, kecenderungan masyarakat yang terus menerima bantuan pemerintah dan tidak berkembang secara mandiri.

Pada sisi faktor eksternal yakni minimnya sarana/prasarana fasilitas layanan dasar seperti, layanan pendidikan, kesehatan, bank dan koperasi desa, serta akses modal dan pasar, selain adanya ketergantungan terhadap cuaca bagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.

Terlepas daripada itu, kawasan pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi secara ekonomi maupun non-ekonomi berupa wilayah yang kaya akan sumber daya alam pesisir, merupakan kawasan strategis jalur lalu lintas perdagangan laut, peningkatan komoditi usaha milik personal dengan standarisasi harga, serta memiliki masyarakat yang bersifat homogen berdasarkan kaitannya dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti yang rata-rata bekerja sebagai nelayan dapat dikatakan cukup potensial, namun kesejahteraan masyarakat pesisir relatif rendah dibanding dengan kelompok masyarakat lain, contohnya petani. Untuk itu, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara

terstruktur ialah melalui program yang langsung menyentuh akar permasalahan dan subjek sasaran, yakni masyarakat di kawasan pesisir melalui pendayagunaan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan yang sesuai untuk masyarakat pesisir khususnya masyarakat dengan mata pencaharian nelayan, berdasarkan analisis SWOT, dihasilkan bahwa, SO (*Strength-Opportunity*); di wilayah pesisir menuntut adanya pembinaan UMKM untuk pendistribusian atau promosi potensi sumber daya pesisir. Dengan begitu, program pemberdayaan dapat dimulai dari pembinaan sumber daya manusia agar memiliki kemampuan untuk produksi. Sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menstimulasi program pemberdayaan yang mendorong iklim UMKM daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

ST (*Strength-Threat*); meningkatkan diversifikasi produk hasil nelayan. Biasanya masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti rata-rata menjual hasil perikanan kepada *Toke*. Untuk mengurangi kegiatan tangkap-jual oleh masyarakat, diperlukan sosialisasi peningkatan kapasitas masyarakat sehingga masyarakat bisa memberikan *added-value* pada hasil tangkapannya sebelum dijual. Potensi masyarakat pesisir yang bergantung pada permintaan hasil produksi ikan yang tinggi dan sumber daya pesisir yang besar akan meningkatkan produktivitas masyarakat yang lebih besar pula.

WO (*Weakness-Opportunity*); dikatakan bahwa dengan adanya program pemberdayaan melalui pembinaan UMKM dan sosialisasi IPTEK, maka produktivitas masyarakat akan semakin baik sehingga menumbuhkan jiwa *entrepreneur* yang tinggi. Artinya bahwa masyarakat akan mendapat informasi

bagaimana cara meningkatkan *value added* di luar dari kegiatan nelayan yaitu dengan pengembangan alternatif mata pencaharian, misalnya usaha pengelolaan limbah ikan dan budidaya digitalisasi akuakultur.

WT (*Weakness-Threats*); Masyarakat pesisir memiliki kompleksitas dalam keterbatasan pengelolaan sumber daya, teknologi, pendidikan, ekonomi, serta peran partisipatif dari kegiatan yang dilakukan antara pihak luar seperti peran tokoh adat, pemuda, lembaga swadaya, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Maka, perlu adanya dukungan dari seluruh *stakeholder*, LSM, dan pihak swasta dalam pemenuhan sarana/prasarana, infrastruktur, dan pemberian program layanan kredit untuk modal usaha bagi masyarakat, baik bersifat uang maupun barang alih-alih bantuan jangka pendek. Hal tersebut dilakukan agar pemberdayaan masyarakat miskin dapat lebih menyeluruh sehingga masyarakat nantinya dapat lebih mandiri, berintegrasi, memiliki usaha pribadi dan melepas diri dari ketergantungan terhadap penadah/*Toke*. Inilah yang membedakan hasil kajian ini dari yang sebelumnya yang hanya membahas mengenai kemiskinan masyarakat pesisir semata. Sehingga hasil program pemberdayaan hanya akan bersifat parsial, *charity*, dan sektoral, namun tidak menyentuh akar kemiskinan masyarakat itu sendiri. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan potensi yang ada didukung dengan program pemberdayaan masyarakat pesisir, karena salah satu misi yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah menciptakan masyarakat yang produktif dan berdaya saing, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Maka dari itu, melalui analisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan yang sesuai bagi masyarakat pesisir ialah program pemberdayaan sosial

ekonomi masyarakat melalui, (1) *funding access*, (2) akses teknologi, (3) *market access*, (4) pengembangan alternatif mata pencaharian, dan (5) *collective action*. Pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir harus dapat diimplementasikan dan secara komprehensif dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek serta memahami potensi sosial ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat.

Melalui pembahasan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pertama, menggeser paradigma pemberdayaan masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dari pendekatan *output* kepada pendekatan proses. Jika sebelumnya berfokus pada peningkatan hasil produksi, maka diubah menjadi berorientasi pada pembinaan dan efisiensi proses dalam upaya pengembangan usaha dan mendayagunakan kualitas sumber daya manusia. Keunggulan dari pendekatan proses ini berupa: 1) merangsang sikap taat aturan dalam menjaga sumber daya pesisir, 2) meningkatkan aktivitas yang menekankan pada pembentukan keterampilan masyarakat, 3) menyediakan tempat agar masyarakat terlibat langsung dengan objek pemberdayaan, 4) membenahan infrastruktur dan penyediaan sarana/prasarana memadai bagi masyarakat pesisir.

Kedua, melakukan kegiatan pemberdayaan yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi produktif, serta menyertakan pelatihan kesadaran pelestarian sumber daya dengan tidak menggunakan sumber daya secara berlebihan (*over exploited*) melainkan memanfaatkan sesuai porsi yang ada.

Ketiga, program pemberdayaan ini diharapkan akan menghasilkan tanggung jawab semua tingkat dalam lingkup sektoral maupun

masyarakat terkait dalam proses pemberdayaan sosial masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti guna meningkatkan kesejahteraan daerah.

Keempat, untuk menghindari ketergantungan terhadap peminjaman modal yang diberikan oleh *Toke* yang umumnya berasal dari daerah lain, maka diharapkan dapat tersedianya lembaga pendukung, seperti koperasi, lembaga keuangan mikro, dana hibah, dan asuransi sosial yang dapat membantu kebutuhan sehari-hari masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, dalam kegiatan pemasaran, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pesisir agar tidak langsung menjual kepada *Toke* maupun keluar daerah sebab keuntungan yang didapat oleh cenderung minim. Penjualan langsung kepada *Toke* menggunakan harga yang ditetapkan oleh para *Toke* tersebut, sedangkan penjualan ke luar daerah, hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan seperti BBM. Untuk itu, berdasarkan identifikasi penulis dari hasil potensi dan sumber potensi kesejahteraan masyarakat pesisir melalui analisis SWOT, program pemberdayaan masyarakat pesisir nantinya diharapkan memiliki orientasi dan fokus pemahaman wawasan *enterpreneur* dengan strategi kegiatan yaitu: pendidikan, pembinaan, pelatihan, dan pendampingan.

Untuk itu, salah satu *support system* kesuksesan pemberdayaan sosial masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti ialah dorongan partisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat pesisir diikuti dengan program peningkatan kesejahteraan dan dukungan penuh dari semua pihak terkait, karena pemanfaatan potensi daerah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti secara ekonomis dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah penulis curahkan kepada Allah SWT yang telah memberi ridho dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kampus tercinta Universitas Islam Riau.
2. Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M. Si dan *Co-Author* yang telah membantu penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. *Jurnal Caraka Prabhu*, 1(2), 84–122.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.95>
- Alim, F. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 12, 10–22.
- Andreas, & Savitri, E. (2016). *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir*. 1998.
- Anggrahita, H., Guswandi, G., & Utami, N. D. N. (2018). Prioritas Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Indonesia. *Majalah Geografi Indonesia*, 32(2), 207.
<https://doi.org/10.22146/mgi.36626>
- Arief, H., & Pradini, U. R. (2019). Analisis Kebijakan Pengembangan Berbasis Keberlanjutan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. *Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE)*, 10(Volume 10, Nomor 1, Juni 2019 ISSN 2087-409X), 11–20.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). *COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*.
- Badan Pusat Statistik (2020). Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka Tahun 2020. <https://merantikab.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2021
- Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Government Collaboration in Empowerment? A Collaborative Framework for the Government in Empowering Coastal Communities. *Journal of Government and Civil Society*, 2(2), 145.
<https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i2.1022>
- Fatmasari, D. (2016). Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. *Al-Amwal*, 6(1), 144–166.
- Febianto, M. D. (2011). Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat. *Universitas Pajajaran*.
- Gevisioner, Bangun, R., & Karyanti. (2014). Community Development Strategy Based In Border States District. *Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau*, 53–62.
- Goenadhi, L. (2016). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal Spread*, 6(1), 17–26.
- Hurmain, & Puriana. (2013). *Transformasi Nelayan di Pesisir Kepulauan Bengkalis (Studi Tentang Pergeseran Pola Interaksi Sosial , Agama , Alat Penangkapan , dan Perubahan Ekosistem) Fisherman Transformation in Coastal of Bengkalis Islamds (Study About Shifting Patterns of Social*.
- Indarti, I. (2015). Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan. *Jurnal Dinamika*

- Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 63–75.
- Isna, F. (2013). 72 *Analisa Bioekonomi Sumberdaya Alat Tangkap Ikan Pelagis Di Kepulauan Meranti Provinsi Riau*. 72–87.
- Iswari, I. G. A. Y., Luh, I., & Kadek Rai, S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Upaya*. 11(2).
- Jannah, M. (2016). *Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan dalam Menghadapi Kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi*.
- Khatami, A., Yonvitner, & Setyobudiandi, I. (2017). Pengelolaan perikanan tropis. *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis*, 1(1), 1–66.
- Kristiyanti, M. (2016). Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melalui pebedkatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 180, 752–760. http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/endi_u/article/view/4264/1270
- Lesnussa, J. U. (2019). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Negeri Halong Baguala Ambon. *Jurnal Sosio Sains*, 5(No, 2), 91–107. <http://journal.ildikti9.id/sosiosains>
- Makagingge, M. H., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2017). Pemberdaan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Mahumu Dua Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Nindatu, P. I. (2019). *Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*. 3(2), 91–103.
- Noor, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Nugroho, M. (2015). Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pemp) Di Kabupaten Pasuruan. *Universitas Yudharta Pasuruan*, 9(1), 1–14.
- Qodriyatun, S. N. (2013). Enhancement of Coastal Community Welfare. *Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data Dan Informasi (P3DI)*, 2000.
- Romawati, E., Topan, A., & Plasma, P. (2017). Peranan Toke Dalam Usaha Budidaya Perikanan Petani Plasma (Studi Kasus di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 3, No, 71–84.
- Rosalinawati. (2013). Persepsi masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Kabupaten Donggala. *JURNAL ACADEMICA FIISP Untad*, 05(02), 1110–1117. <https://media.neliti.com/media/publication/s/28497-ID-persepsi-masyarakat-terhadap-program-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-pesisir-pem.pdf>
- Rosni, R. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*, 9(1), 53. <https://doi.org/10.24114/jg.v9i1.6038>
- Sabarisman, M. (2017). Identifikasi dan pemberdayaan masyarakat miskin pesisir. *Sosio Informa*, 3(200), 216–235.
- Safitri, D. P., Edison, & Kurnianingsih, F. (2017). Analisis Sound Governance : Model Kemitraan Pemerintah Daerah dan Civil Society Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 5(2), 35–47.
- Safrizal (2014) Enam Potensi Menuntungkan di Meranti, <https://www.goriau.com/>

- Diakses Rabu, 24 Maret 2021
- Sara, L., Hamid, A., & Sciences, O. (2011). Empowering Coastal Community By Implementing Natural Resources Management (Case study in Southeast Sulawesi, Indonesia). *Journal of Coastal Development*, 14(3), 202–213. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/coastdev/article/view/2102>
- Siti, R., Sidiq, S., Sosiologi, P. S., Riau, U., & Terpencil, K. A. (2020). *Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. 10, 217–227. <https://doi.org/10.33366/rfr.v>
- Sjafari, A., Nugroho, K. S., Arenawati, & Otaviana, O. (2018). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Provinsi Banten : Studi Kasus di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dan Desa Citeurep Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. *Kebijakan Pembangunan Daerah*, 2(1), 1–12.
- Sudarso. (2011). Tekanan Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan Tradisional di Perkotaan. *Universitas Airlangga*.
- Sutrisno, E. (2014). Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon) §. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 1–12.
- Syatori, A. (2014). Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon). *Jurnal Holistik*, 15(2), 241.
- Tampubolon, D. (2013). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Sorot*, 8(2), 153. <https://doi.org/10.31258/sorot.8.2.2358>
- Wahdaniyah, N., Jufriadi, J., & Surur, F. (2018). Strategi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(1), 64. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.64-73>
- Witarsa, W. (2015). Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Co-Management Sumberdaya Perikanan Di Kabupaten Pontianak. *Jurnal Economia*, 11(1), 26. <https://doi.org/10.21831/economia.v11i1.7752>